

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan**

Teori keagenan merupakan dasar teoritis yang mendasari praktik bisnis perusahaan selama bertahun-tahun yang berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Teori keagenan (*Agency Theory*) mengungkapkan adanya hubungan antara agen dan principal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas khusus untuk prinsipal bersama dengan tanggung jawab untuk tugas yang diberikan. Prinsipal memiliki kewajiban untuk memberi penghargaan kepada agen untuk layanan yang diberikan oleh agen. Meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dan menyebabkan terjadinya konflik. Prinsipal dan agen sama-sama ingin memaksimalkan keuntungan serta menghindari risiko (Belkaouli dalam Muthaher, 2019). Oleh karena itu, prinsipal harus memantau kerja agen agar tujuan organisasi dalam pemerintahan dapat tercapai secara efisien dan efektif sehingga tercipta akuntabilitas publik (Abdullah dalam Adrian *et al.*, 2019).

Sejak pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999, teori keagenan dalam pemerintahan daerah mulai diterapkan. Penerapan teori keagenan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif serta legislatif dengan rakyat, implikasinya dapat berupa hal positif seperti efisiensi, tetapi dalam bentuk negatif seperti perilaku oportunistik (Subaweh dalam Muthaher, 2019). Hal ini terjadi karena agen memiliki keunggulan atas informasi keuangan daripada prinsipal, sedangkan prinsipal dapat memanfaatkan kepentingan pribadinya (*self interest*) karena keunggulan kekuasaannya. Oleh karena itu, masalah akan muncul ketika sebuah lembaga eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi (*self interest*) yang dimulai dari penganggaran, proses pengambilan keputusan sampai dengan penyajian laporan keuangan hanya untuk memperlihatkan bahwa

kinerja mereka telah baik serta untuk mengamankan posisi di mata legislatif dan rakyat.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah serta dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pemerintah daerah sebagai pelaksana juga bertanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan wajar serta bagaimana mereka mampu membuka akses bagi para pengguna laporan keuangan (*stakeholder*). Pemerintah daerah akan menghindari risiko berupa ketidakpercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja mereka. Pemerintah daerah juga akan berupaya untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada masyarakat khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dengan menunjukkan laporan keuangan yang berkualitas. Prinsipal sangat menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah (Muthaher, 2019).

### **2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:1) laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Pada kesimpulannya pengertian laporan keuangan merupakan dokumen yang memberikan informasi pencatatan dari segala transaksi yang berkaitan dengan uang, pembelian dan penjualan serta kredit. Laporan keuangan juga berfungsi untuk mengetahui keadaan finansial suatu perusahaan, sehingga laporan keuangan yang

dibuat dapat secara detail, tepat dan dengan perhitungan yang baik (PSAK No. 1 (2015:2)).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:3) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan serta kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat/daerah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan mengenai aset, kewajiban serta ekuitas pada akhir periode tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional berupa ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas serta penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan arus kas juga menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai penjelasan pos-pos laporan keuangan yang disajikan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi mengenai ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Laporan keuangan yang dimaksud yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Said dan Noch, 2018). Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip. Laporan keuangan menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut berguna oleh para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik untuk memenuhi kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu sebagai berikut :

a. Relevan

Informasi yang termuat didalam laporan keuangan dikatakan relevan apabila mempengaruhi keputusan pengguna yaitu dengan cara membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi tersebut dikatakan relevan apabila :

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi yang disajikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin meliputi seluruh informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat

dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan atau kesalahan dapat dicegah sebelumnya.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Informasi dapat dikatakan andal apabila :

1. Penyajian jujur, menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan karakteristik yang disyaratkan maka kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan akan terbebas dari kesalahan atau kekeliruan yang menyimpang, sehingga para pengguna laporan keuangan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan karakteristik yang disyaratkan maka akan menimbulkan permasalahan.

### **2.1.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia yang kompeten serta memiliki pemahaman secara rinci tentang akuntansi sangat dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristiknya yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kompetensi sumber daya manusia akan berpengaruh dalam proses penyusunan laporan keuangan karena sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Setiap individu diharuskan untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang akuntansi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau kekeliruan yang akan terjadi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku (Satriawan dan Dewi, 2020).

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Menurut Uha (2014) Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidikan formal PNS menuju pengembangan pembangunan dan membangun wawasan keilmuan.
2. Mengoptimalkan diklat dan peningkatan bintek untuk mewujudkan kompetensi dan keterampilan teknis.

3. Penyusunan standar kompetensi jabatan dalam menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
4. Pembinaan karier PNS yang terstruktur dan profesional dengan pola pikir secara umum dan kerja secara spesial dalam riil produksi.
5. Pengembangan jabatan fungsional menuju spesialisasi dengan kebutuhan tuntutan kerja.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2018 mengenai sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdayaguna dan berhasilguna. Sedangkan, menurut Pattiasina dan Noch (2019) sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuannya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Partini dalam Anggadini *et al.*, (2021) indikator kompetensi sumber daya manusia yaitu :

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan dan pemahaman informasi yang dimiliki seseorang karyawan serta pemahaman bagaimana cara menggunakan informasi yang tepat dan benar di bidangnya masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

2. Kemampuan (*skill*)

Kemampuan yang dimiliki seseorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Seseorang karyawan dapat



mengasah kemampuan dengan pengalaman atau dengan melakukan berbagai pelatihan yang dilakukan secara berlanjut yang akan meningkatkan kemampuan dalam mempermudah penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya dalam mencari solusi apabila mengalami suatu permasalahan.

### 3. Perilaku individu (*attitude*)

Pola dan perilaku seseorang karyawan yang sangat mendukung karakternya sebagai seseorang yang berada pada lingkungan masyarakatnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan instansi. Perilaku individu atau *attitude* merupakan modal seseorang dalam membawa diri dalam pergaulan dan bekerja sama dengan pihak lain karena hal ini menentukan diterima atau tidaknya seseorang dalam lingkungan masyarakatnya.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah lebih baik jika didukung pengolahan sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia dengan keterampilan akuntansi yang baik mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi (Yusrianti et al., 2021). Sumber daya manusia yang kompeten juga dapat bertanggungjawab atas tugas yang dikelolanya dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku secara lengkap dan wajar serta membuat laporan keuangan relevan dan andal sehingga semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat (Ardianto dan Eforis, 2019).

#### **2.1.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi (jaringan dan komputer) memberikan banyak keuntungan baik dari segi akurasi/presisi hasil operasi maupun predikat sebagai multiguna (Dewi dan Hoesada, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mengurangi kesalahan atau kekeliruan yang terjadi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi

informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Teknologi Informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan serta memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Anggadini et al., 2021). Teknologi informasi merupakan aplikasi pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah oleh pemerintah daerah untuk dapat menggunakan semua jenis teknologi informasi dan komputer untuk menyediakan informasi dan layanan pemerintah kepada publik (Rifandi, 2018). Teori pendukung lainnya menurut Kaukab dan Lufthiadi (2021) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi meliputi pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen serta proses kerja secara elektronik untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja dengan manfaat agar proses pelaporan keuangan berjalan dengan baik. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, mengelola informasi, sistem manajemen serta proses kerja secara komputerisasi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dalam mengambil keputusan.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk mempermudah para karyawannya dalam mengakses, mengelola dan menggunakan informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cepat dan akurat. Menurut Muslihudin dan Oktafianto (2016:41) indikator pemanfaatan teknologi informasi yaitu sebagai berikut :

1. *Hardware* yaitu terdiri dari komponen *input*, proses, *output* dan jaringan
2. *Software* yaitu terdiri dari komponen operasi, utilitas dan aplikasi

3. Data mencakup struktur data, keamanan dan integritas data
4. Prosedur seperti dokumentasi, prosedur sistem, buku petunjuk operasi dan teknis
5. Manusia yaitu pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam akuntansi mempengaruhi kepuasan para pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut (Rifandi, 2018). Saat ini, pemerintah daerah menggunakan *software* SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) internal pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menyusun laporan keuangan. *Software* SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi juga meliputi komputer dan jaringan yang akan membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan sehingga semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan.

#### **2.1.5. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan**

Dalam mengelola keuangan Negara dan Daerah, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana dan transaksi ekonomi lainnya. Sistem akuntansi merupakan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal dan tepat waktu serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mengambil keputusan. Sistem akuntansi keuangan daerah dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 secara lengkap dan membuat laporan keuangan menjadi relevan dan dapat dibandingkan secara internal maupun eksternal sehingga apabila semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah

maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) juga mengharapkan pemerintah dapat menghasilkan serta mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Defitri, 2018). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian sistem mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak luar maupun internal pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi (Binawati dan Nindyaningsih, 2022). Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisarian sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Indikator Sistem Akuntansi Keuangan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi :

#### 1. Pencatatan

- a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
- b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
- c. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

## 2. Pengikhtisaran

- a. Berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi, penyusunan neraca saldo yaitu suatu daftar memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
- b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling *up to date*.
- c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
- d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
- e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
- f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

## 3. Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Halim dan Kusufi (2012) yaitu sebagai berikut :

### 1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban memiliki tujuan yang berarti memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat serta berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Tujuan pertanggungjawaban juga mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan.

### 2. Manajerial

Manajerial memiliki tujuan yang berarti akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

### 3. Pengawasan

Pengawasan memiliki tujuan yang berarti akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Karakteristik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yaitu sebagai berikut :

#### 1. Basis Akuntansi

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menggunakan 2 basis akuntansi yaitu basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca.

#### 2. Sistem pembukuan

Sistem pembukuan yang digunakan pemerintah yaitu sistem pembukuan berpasangan (*double entry system*) yang didasarkan pada persamaan akuntansi. Setiap transaksi yang dibukukan yaitu dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam suatu organisasi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil oleh pemakai laporan keuangan tersebut.

## 2.2. Review Penelitian Terdahulu

Nilamsari *et al.*, (2020) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan perangkat daerah sistem akuntansi keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di OPD Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah kantor OPD di Kota Semarang. Sedangkan, sampel narasumber sebanyak 64 responden. Penelitian ini

menggunakan kuesioner yang menggunakan skala likert 1-5. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dikumpulkan melalui kuesioner langsung. Analisis data menggunakan *multiple analysis regression*. Hasil analisis menggunakan regresi berganda secara parsial menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Teknologi informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara bersamaan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Zulvia *et al.*, (2020) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya dan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah daerah Kota Padang. Populasinya adalah seluruh pegawai keuangan pada instansi pemerintah kota Padang dengan menggunakan teknik *convenience sampling* yang diterapkan untuk menentukan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan pada instansi pemerintah kota Padang yang memenuhi kriteria. Jumlah sampel yang digunakan adalah 142 responden yang digambar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner terukur dengan skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Padang, Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan artinya terjadi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah kota Padang. Dengan demikian, informasi keuangan pemerintah akan menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah artinya aktif atau

tidaknya audit internal dalam mengawasi laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Pujanira dan Taman (2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 dinas-dinas daerah pemerintah daerah DIY. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner kepada 120 responden pegawai penatausaha keuangan. Jenis angket dalam penelitian yaitu angket tertutup. Berdasarkan hasil penelitian adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY.

Indah dan Setiyawati (2019) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Metode atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menekankan pada hubungan kausalitas kuantitatif yang menekankan kausalitas (hubungan sebab akibat). Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 86 pegawai yaitu kepala sub bagian keuangan dan bendahara/tatausaha yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah Kota Tangerang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara langsung. Data primer berasal dari hasil pengumpulan data berupa kuesioner. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan pengaruh kepatuhan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan



signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Anggadini *et al.*, (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap keterandalan laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif yang bersumber pada data primer dengan teknik pengumpulan kuesioner yang disebarakan ke pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Peneliti menentukan populasi dengan menggunakan *Sensus Sampling* yaitu dengan menjadikan keseluruhan populasi menjadi sampel dengan jumlah 16 sampel (responden). Pengolahan data yang dilakukan berupa uji statistik berbasis regresi berganda serta uji hipotesisnya menggunakan bantuan aplikasi SPSS 23. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan keterandalan laporan keuangan dan teknologi informasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan (Y) yang berarti teknologi informasi memberikan pengaruh yang kuat arah positif terhadap keterandalan laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Zulvia *et al.*, (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern, kualitas sumber daya dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat keuangan pada instansi pemerintah kota Padang dengan menggunakan teknik *convenience sampling* untuk menentukan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan pada instansi pemerintah kota Padang yang memenuhi kriteria. Jumlah sampel yang digunakan adalah 142 responden yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner yang diukur dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah

Kota Padang. Jika pengendalian internal membaik, maka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan sebaliknya. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah Kota Padang. Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah kota Padang yang artinya pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah diperlukan untuk mengambil memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Satriawan dan Dewi (2020) penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali serta membuktikan pengaruh pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Indikator yang digunakan untuk pengukuran adalah relevansi, keandalan, dapat dipahami dan dibandingkan. Jumlah responden sebanyak 116 yang disebarkan pada 29 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dengan menentukan kinerja terhadap respondennya. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan *moderated regression analysis*. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh serta komitmen organisasi mampu memperkuat pengendalian intern tetapi tidak mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan.

Defitri (2018) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif yang dilakukan pada organisasi perangkat daerah di Kota Solok. Pengambilan data dilakukan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berada pada bagian keuangan atau akuntansi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui program *Statistical Package for Social Science (SPSS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.

Binawati dan Nindyarningsih (2022) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moderasi sistem akuntansi keuangan daerah, mengetahui kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan teknologi informasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/administrasi keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Klaten sebanyak 24 Dinas dengan kriteria memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam masa penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan 152 orang sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, secara simultan dan parsial menunjukkan hasil sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas akuntansi keuangan daerah yang dibuktikan dari hasil uji simultan (Uji-F) dan hasil uji parsial (Uji-t).

Ardianto dan Eforis (2019) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah. Sampel penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Tangerang dengan beberapa karakteristik. Ciri-cirinya adalah menggunakan SIMDA sebagai sistem akuntansi keuangan serta terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner untuk

pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel adalah *non probability sampling* yaitu *convenience sampling*. Hasil penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari beberapa peneliti yang sudah melakukan uji terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan menunjukkan bahwa rata-rata tiap variabel berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi ada juga yang tidak berpengaruh. Terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu teknik pengambilan data menggunakan kuesioner, variabel yang digunakan yaitu variabel bebas dan variabel terikat seperti variabel kompetensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), penerapan sistem akuntansi keuangan (X3) dan kualitas laporan keuangan (Y). Sedangkan, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu periode laporan keuangan yang akan diteliti yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020, tempat penelitian yang akan diteliti yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, waktu penelitian yaitu tahun 2022 dan variabel yang digunakan (variabel bebas) oleh peneliti terdahulu seperti variabel sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan dan audit internal. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda, penggunaan teknologi informasi yang berbeda-beda seperti perangkat komputer, jaringan internet dan *software* aplikasi yang digunakan serta sistem akuntansi keuangan yang diterapkan berbeda setiap pemerintah daerah.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui dan mendeskripsikan kepada pengguna laporan keuangan tentang kompetensi sumber daya manusia yang mengelola laporan keuangan DKI Jakarta, teknologi informasi yang digunakan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan

pemerintah DKI Jakarta dan sistem akuntansi keuangan yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta apakah sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan orang atau individu yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan memegang peranan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan keuangan yang berkualitas (Muthaher, 2019). Dalam mendukung keberhasilan penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Setiap individu diharuskan untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang akuntansi guna meminimalisir terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku (Satriawan dan Dewi, 2020). Dalam menerapkan kemampuannya, berhasil atau tidaknya sumber daya manusia bergantung pada sejauh mana implementasi pengetahuan yang dimiliki terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak memiliki keterampilan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap kualitas laporan keuangan, maka laporan keuangan tidak dapat bernilai dalam fungsinya untuk pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusrianti *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, menurut Indah dan Setiyawati (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian mengenai kompetensi sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.**

### **2.3.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan serta memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan (Anggadini et al., 2021).

Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, teknologi informasi memiliki peranan besar dan berfungsi sebagai pengolahan, penyimpanan informasi dan penyebaran informasi (Puspita dan Amalia, 2018). Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat, seluruh pemangku kepentingan akan memiliki kesempatan untuk mengakses, mengelola serta menggunakan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah secara stabil dan akurat (Zulvia et al., 2021). Dengan kata lain, pernyataan diatas menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pengelolaan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, menurut Satriawan dan Dewi (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta.**

### **2.3.3. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisarian sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (komputerisasi).

Apabila sistem akuntansi belum dipahami dengan baik maka dalam menyusun laporan keuangan akan terhambat. Menurut Eliana (2017) apabila sistem akuntansi lemah maka laporan keuangan yang dihasilkan akan kurang handal dan kurang relevan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Binawati dan Nindyaningsih (2022) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, menurut Ardianto dan Eforis (2019) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian mengenai sistem akuntansi keuangan dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

**H3 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.**

#### 2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel yang akan diteliti, dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia ( $X_1$ ), pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) dan penerapan sistem akuntansi keuangan ( $X_3$ ). Sedangkan, variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan ( $Y$ ). Berdasarkan landasan teoritis, review penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel, kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

